

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi desa memiliki arti penting dalam proses pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan, karena desa memiliki “hak otonom”, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus secara bebas rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat. Untuk mewujudkan kemandirian pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada wilayah perdesaan, dituntut keterlibatan sosiokultural yang ada dalam masyarakat. Hal ini semakin membuka peluang bagi masyarakat desa untuk memanfaatkan nilai-nilai budaya serta pranata sosial setempat demi mewujudkan keberhasilan pembangunan di desanya masing-masing.

Melalui otonomi desa, terbuka kesempatan yang luas untuk mengetahui sumber daya, masalah, kendala serta memperbesar akses setiap warga desa untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya, atau sebaliknya bagi pemimpin dapat mengetahui kebutuhan desa secara tepat. Pembangunan desa memiliki sifat yang multidimensional menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat di desa. Dari sudut pemerintahan, pembangunan desa dioperasionalkan melalui berbagai sektor dan program yang saling terkait dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah.

Pada realitasnya, masyarakat desa sampai saat ini tetap memiliki berbagai keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya modal. Kerja sama yang dibangun antara pemerintah dengan masyarakat akan menciptakan pola hubungan yang serasi dalam proses pelaksanaan pembangunan di perdesaan. Sasaran pembangunan secara nasional yang harus dicapai yaitu pembangunan perdesaan (*rural development*) yang makin maju. Pembangunan perdesaan sangat luas aspeknya, salah satu jenis pembangunan di wilayah perdesaan yang harus diprioritaskan adalah pembangunan di bidang infrastruktur. (Raharjo, 2013:45)

Melaksanakan pembangunan infrastruktur di desa sebagai implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa. Pembangunan infrastruktur desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat serta untuk masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf kehidupan yang layak.

Pembangunan infrastruktur desa yang merupakan keterpaduan antar berbagai kebijakan pemerintah dengan partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat, perlu didukung dengan kemampuan aparaturnya pemerintah dalam menciptakan iklim keterpaduan yang serasi dan berkesinambungan dalam memanfaatkan segala sumber daya di desa untuk didayagunakan dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Untuk mencapai hasil maksimal pembangunan infrastruktur di perdesaan, dimulai dari proses perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan pembangunan, yang kata kuncinya diperlukan pengelolaan secara sistematis.

Sistem manajemen pemerintahan sebagai perangkat integral dan melekat dengan pengelolaan pembangunan desa berfungsi untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan itu, aspek kemampuan manajemen aparat desa sebagai penentu dan penyelenggara manajemen pemerintahan desa sangat berperan dalam proses pembangunan desa. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan pembangunan desa di bidang infrastruktur dibutuhkan kemampuan manajemen aparat desa yang handal dalam usaha memberikan kepuasan bagi masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sesuai tujuan keberadaan institusi pemerintahan sebagai organisasi publik.

Kemampuan manajemen aparat desa yang handal dalam hal ini adalah kemampuan aparat desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan yang sudah dibuat aparat desa dalam memajukan pembangunan desa dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Fungsi-fungsi yang dimaksud adalah Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), dan pengendalian (*Controlling*) Terry dalam (Kusdi, 2009:8).

Kemampuan dasar yang mutlak harus dimiliki seorang aparat desa adalah kemampuan perencanaan, yang mana dari keempat fungsi manajemen tersebut, kemampuan perencanaan menjadi yang terpenting karena menjadi pondasi dalam menentukan arah pembangunan pada suatu desa. Sehingga nantinya pembangunan tersebut mempunyai dampak yang positif terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat atau hanya sekedar menjadi pembangunan belaka. Kemampuan perencanaan yang baik yang dimiliki oleh aparat desa merupakan awal dari pembangunan yang berkualitas, kemampuan perencanaan akan membawa desa tersebut kepada pembangunan yang terintegrasi dengan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Penengahan adalah sebuah desa yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki peranan besar dalam proses pembangunan di tingkat desa. Sehingga peranan aparat desa dalam hal ini memegang peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Penengahan. Desa Penengahan yang merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan memiliki jumlah penduduk 2,357 jiwa dengan luas wilayah 1,586 ha Tahun 2015. (Profil Desa Penengahan, 2015)

Desa Penengahan dalam hal pembangunan infrastruktur sudah terlihat cukup maju dibandingkan desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Penengahan, yang satu diantaranya pembangunan di bidang infrastruktur yang berupa fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jembatan, jalan, transportasi dan air bersih. Hal ini dikarenakan letak Desa Penengahan yang berdekatan dengan pusat kecamatan, dengan jarak 6 km, dan ke ibukota kabupaten berjarak 27 Km, sehingga proses penyelenggaraan pembangunan cepat terlaksana (Profil Desa Penengahan, 2015).

Beberapa pembangunan infrastruktur di Desa Penengahan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan antara lain:

Tabel 1: Pembangunan Infrastruktur di Desa Penengahan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan

No	Jenis Infrastruktur	Jumlah	
1.	Jalan Desa	Panjang Jalan Aspal	4 km
		Panjang Jalan Makadam	6 km
		Panjang Jalan Tanah	16 km
2.	Jalan Antar Desa/Kecamatan	Panjang Jalan Aspal	6 km
		Panjang Jalan Makadam	-
		Panjang Jalan Tanah	-
3.	Jembatan Desa	Jumlah Jembatan Beton	5
		Jumlah Jembatan Besi	1
		Jumlah Jembatan Kayu	10
4.	Jembatan Antar Desa/Kecamatan	Jumlah Jembatan Beton	2
		Jumlah Jembatan Besi	-
		Jumlah Jembatan Kayu	2
5	Gedung Sekolah	SD	2
		Lembaga Keagamaan	2
6	Tempat Ibadah	Masjid/Musholla	7
7	Lapangan Olah Raga	Sepak Bola	1
		Bulutangkis	1
		Voli	1
8	Fasilitas Kesehatan	Puskesmas	2
		Posyandu	3
9	Air Bersih	Sumur Pompa	3
		Sumur Gali	23
		Hidran Umum	6
		MCK	2
10	Irigasi	Saluran Primer	Data Tidak Terhimpun
		Saluran Sekunder	Data Tidak Terhimpun
		Saluran Tertier	Data Tidak Terhimpun
		Pintu Sadap	Data Tidak Terhimpun
		Pintu Pembagi Air	Data Tidak Terhimpun

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Penengahan Tahun 2011-2015

Berdasarkan data pembangunan infrastruktur desa yang diperoleh dari RPJM Desa Penengahan Tahun 2011-2015, tingkat pembangunan infrastruktur di Desa Penengahan sudah menunjukkan angka yang cukup baik, hal ini terlihat dari banyaknya pembangunan fasilitas prasarana transportasi, prasarana publik, prasarana irigasi, dan prasarana air bersih.

Hal ini sesuai dengan tujuan Desa Penengahan, yaitu menetapkan Desa Penengahan sebagai pusat pengembangan pertanian dan infrastruktur. Fokus pengembangan pertanian dan pembangunan infrastruktur yaitu pada pertanian dan pembangunan infrastruktur yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat Desa Penengahan yang sejahtera (RPJM Desa Penengahan Tahun 2011-2015)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan aparat desa yang dilakukan pada 28 Februari 2015 di Desa Penengahan, penulis memperoleh informasi bahwa, sejauh ini pembangunan infrastruktur di Desa Penengahan sedang diaktifkan kembali, setelah periode kepemimpinan kepala desa sebelumnya hampir tidak ditemukan pembangunan dalam bidang apapun khususnya bidang infrastruktur. Salah satu pembangunan infrastruktur yang sangat terlihat dan dirasakan oleh masyarakat adalah pembangunan jalan di Dusun VI (PKS), jalan yang menghubungkan Dusun VI dengan jalan utama atau jalan lintas sumatera. Sebelumnya untuk menuju ke dusun tersebut tidak dapat dilalui oleh kendaraan bermotor apalagi ditambah dengan kondisi jalan yang becek. Namun saat ini, masyarakat yang tinggal di Dusun VI sudah memiliki jalan yang cukup baik untuk membantu mereka dalam beraktivitas sehari-hari, apalagi mayoritas pekerjaan masyarakat di dusun ini adalah bertani, jadi mereka sangat terbantu untuk mobilitas mereka menuju keluar masuk dusun baik itu untuk keperluan individu ataupun keperluan mereka untuk membeli pupuk dan memasarkan hasil tani.

Produktivitas aparat desa dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja aparat desa yang paling penting. Dalam hal ini produktivitas adalah hasil (*output*) yang diperoleh dari program pembangunan infrastuktur yang sudah terlaksana di Desa Penengahan, yang dapat terwujudkan.

Kemampuan manajemen aparat desa sangat diperlukan dalam upaya rencana peningkatan pembangunan infrastruktur desa, karena pembangunan infrastruktur yang terus mengalami penambahan sejalan dengan pertumbuhan dan permintaan kebutuhan masyarakat. Disinilah kemampuan manajemen aparat desa dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen tersebut sangat diperlukan, apabila seorang aparat desa tidak memiliki kemampuan manajemen yang baik dimulai dari fungsi perencanaan sampai fungsi pengawasan, maka rencana pembangunan tidak akan menyentuh kebutuhan masyarakat desa.

Rencana Pembangunan Infrastruktur Desa Penengahan, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan yang terdapat pada RPJM Desa Penengahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Rencana Pembangunan Infrastruktur Desa Penengahan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan Kebutuhan Tiap Dusun.

No	JENIS RENCANA PEMBANGUNAN
(1)	(2)
Dusun I.	
1	Pembangunan Badan Jalan P:2500 M
2	Pembangunan Badan Jalan P: 4000 dan L: 5m
3	Perbaikan Jalan Becek P:1800m dan L:5m
4	Perbaikan Lapen P: 1000m dan L: 3m
5	Pembangunan Talut Jalan P:600m x 80cm x 2
6	Pembangunan Sanitasi Lingkungan 50cm x 40cm
7	Pembangunan Balai Desa
8	Pembangunan Saluran Irigasi
9	Pembangunan Sarana Air Bersih Di RT 01 Dan RT 02/ Sumur 2 Unit
10	Pembangunan 1 Unit Sumur Bor dan MCK Di RT 02
Dusun II	
11	Pembangunan Badan Jalan P: 1500m dan L: 5m
12	Pembangunan Badan Jalan P: 1200m dan L: 5m
13	Pembangunan Gang P: 250m dan L: 2m
14	Pembangunan Gang P: 300m dan L: 2m
15	Pembangunan Gang P: 150m dan L: 2m
16	Pembangunan Sanitasi Lingkungan 100 x 40 x 60cm
17	Pembangunan Jalan Lapen P:1000m dan L: 3m
18	Pembangunan Jalan Yang Masih Tanah P: 2000m dan L: 3m
19	Pembangunan Badan Jalan P: 1700m
20	Pembangunan Lapangan Bola
21	Pembangunan Gardu Ronda, 2 Unit
Dusun III	
22	Perbaikan Gang Becek P: 250m dan L: 2m
23	Perbaikan Gang Becek P:100m dan L: 2m
24	Perbaikan Gang Becek P: 150m dan L: 2m
25	Perbaikan Jalan Becek P: 1500m dan L: 5m
26	Pembangunan Talut Jalan P: 1000m
27	Perbaikan Rumah Reot 16 Unit
28	Perbaikan Gorong-Gorong 3 Unit
Dusun IV	
29	Perbaikan Jalan Tanah Becek P:500m dan L:5m
30	Perbaikan Gang Tanah Becek P:200m dan L:2m
31	Perbaikan Gang Tanah Becek P:270m dan L:2m
32	Pembangunan Talut Jalan/Siring di Depan Masjid
33	Pembangunan Gorong-Gorong 2 Unit

1	2
34	Perbaikan Rumah Warga Tidak Layak Huni
35	Pembangunan Talut Siring
Dusun V	
36	Perbaikan Jalan Rusak P:370m dan L:3m
37	Perbaikan Jalan Rusak P:2000m dan L:5m
38	Pembangunan Jembatan Beton 6m x 4m
39	Perbaikan Jalan Menuju Masjid P:200m dan L:5m
40	Perbaikan Jalan Setapak Becek P:2800m
41	Perbaikan Jalan Penghubung Ke Dusun 6 P:1900m
42	Perbaikan Jalan Makam P:500m dan L:5m
43	Pembangunan Jembatan Beton 1 Unit, P: 3m dan L: 4m
44	Perbaikan Jalan Lingkar Dusun P: 800m dan L: 5m
45	Perbaikan Jalan Menuju Perkebunan Warga P: 1300m dan L :5m
46	Pembangunan Gapura Desa
47	Pembangunan Gorong-Gorong 5 unit
48	Aliran Listrik Di Dusun 5 (Gunung Botol)
Dusun VI	
49	Perbaikan Jalan Onderlagh P:500m dan L:3m
50	Perbaikan Jalan Poros RT 01 P:3000m dan L:5m
51	Perbaikan Jalan Penghubung RT 01 Menuju RT 02 P:1800m dan L:5m
52	Perbaikan Jalan Onderlagh RT 02 P: 800m dan L:3m
53	Perbaikan Jalan Becek P:1000m dan L:5m
54	Perbaikan Jembatan Rusak RT 02 1 Unit dengan P:6m Dan L:4m
55	Pembangun MCK Dan Sumur Bor di RT 01
56	Pembangun MCK Dan Sumur Bor di RT 02
57	Pembangunan Gedung Posyandu di RT 01
58	Pembangunan Gedung TP1
59	Pembangunan SDN Kecil
60	Pembangunan Gardu Ronda
61	Pembangunan Balai Pertemuan
Dusun VII	
62	Perbaikan Jalan Rusak P:270m dan L:3m
63	Perbaikan Jalan Becek P:400m dan L:3m
64	Pembangunan Talut Siring
65	Pembangunan Saluran Irigasi
66	Pembangunan Sarana Air Bersih
67	Perbaikan Gorong-Gorong 2 Unit
68	Perbaikan Jalan Setapak Becek P:3000m

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Penengahan Tahun 2011-2015

Rencana pembangunan infrastruktur Desa Penengahan yang terdapat pada RPJM Desa Penengahan sangat bergantung pada pembangunan maupun perbaikan infrastruktur transportasi darat seperti jalan, gang, jembatan. Hal ini menunjukkan masih banyaknya infrastruktur transportasi darat yang rusak, kerusakan ini pada awalnya disebabkan oleh tergenangnya air sehingga membuat jalanan menjadi becek.

Hal lain yang menjadi alasan bagi aparat desa untuk menempatkan pembangunan atau perbaikan infrastruktur transportasi darat menjadi pembangunan infrastruktur yang paling dominan adalah sesuai dengan pekerjaan mayoritas masyarakat Desa Penengahan yaitu bertani dan berkebun, aparat desa menganggap perlu memperbaiki jalan-jalan yang sudah rusak, sehingga dapat mempermudah mobilitas masyarakat desa yang ingin pergi ke lokasi tempat mereka berkerja ataupun menjual hasil tani mereka.

Rencana pembangunan infrastruktur lebih banyak terdapat di Dusun V (Gn.Botol) dan Dusun VI (PKS), hal ini dikarenakan lokasi dusun yang memang berjauhan dengan dusun induk, sehingga pembangunan desa secara umum dan pembangunan infrastruktur khususnya belum tersentuh di dusun ini. Khususnya pada Dusun V (Gn.Botol) masih ditemukan rumah tangga yang belum mendapatkan aliran listrik, sehingga hal ini menjadi pembangunan prioritas bagi aparat desa.

Pada proses penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa, Aparat Desa Penengahan tentu mendapatkan permasalahan, baik permasalahan dari faktor

internal maupun dari faktor eksternal. Berikut penulis sajikan permasalahan pembangunan infrastruktur yang dihadapi Aparat Desa Penengahan

Tabel 3: Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Penengahan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan

Bidang Masalah	Permasalahan
Pembangunan Infrastruktur	1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya pemeliharaan pembangunan
	2. Lokasi pembangunan yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial
	3. Masih terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Penengahan Tahun 2011-2015

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya pada pemeliharaan pembangunan dikarenakan pola pikir masyarakat yang masa bodoh menganggap pembangunan itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Pembangunan desa yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial masyarakat desa dan terbatasnya dana pembangunan desa yang dikelola juga menjadi permasalahan pokok yang harus dikelola aparat desa. Pengelolaan permasalahan di atas dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen sehingga permasalahan pembangunan infrastruktur yang terdapat pada Desa Penengahan menjadi suatu kekuatan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa sebenarnya banyak potensi-potensi daripada pembangunan dan rencana pembangunan infrastruktur desa, apabila rencana pembangunan infrastruktur tersebut dapat terealisasi akan menambah pemasukan ekonomi bagi masyarakat di Desa Penengahan,

dan secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Penengahan.

Fenomena di atas menguatkan asumsi bahwa kemampuan manajemen aparat desa dalam mengelola manajemen pemerintahan desa sangat diperlukan untuk mengembangkan potensi-potensi dari masalah pembangunan yang terdapat di Desa Penengahan. Kemampuan manajemen yang dimiliki masing-masing aparatur desa, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat berjalan dari proses perencanaan hingga pada proses pengawasan, sehingga pembangunan infrastruktur dapat menjadi pondasi kuat bagi pertumbuhan perekonomian pada Desa Penengahan dan semakin meningkatkan angka kesejahteraan penduduk desa.

Atas dasar kondisi objektif di atas, salah satu kunci keberhasilan organisasi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa, terletak pada kemampuan manajemen aparat desa. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut seberapa besar Pengaruh Kemampuan Manajemen Aparat Desa Penengahan, Lampung Selatan Terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur Desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Seberapa Besar Pengaruh Kemampuan Manajemen Aparat Desa Penengahan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan Terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur Desa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Besarnya Pengaruh Kemampuan Manajemen Aparat Desa Penengahan, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan Terhadap Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur Desa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan menambah kajian ilmu pemerintahan, terutama dalam studi pembangunan dan pemerintahan di wilayah perdesaan.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, dalam meningkatkan kinerja aparatur desa melalui kemampuan manajemen dalam menunjang pembangunan infrastruktur desa, dan hasil penelitian ini juga berguna bagi para peneliti yang berminat pada penelitian sejenis.